

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo

Sarfjan Tabo¹, Arpin², Nursafitra M³, Ahjar Biongan⁴

¹²³ Universitas Negeri Makassar

⁴ Universitas Gorontalo

¹sarfandjtabo@gmail.com, ²arpinnono@gmail.com, ³vitanursafitra@gmail.com,
⁴ahjarbiongan@gmail.com

Abstract

The role of the government bureaucracy has a position in poverty alleviation through programs that have been planned. The role of the government down to the village/kelurahan level which has direct health insurance as the element in charge, executor and companion, must be able to stimulate the growth of community creativity and motivation. Local government according to Feelel heady (1971) is: a phenomenon associated with large scale organizations, the identity of local government as a form of social organization that has certain characteristics. Bureaucracy in organizational terms has the characteristics of a hierarchy of power, specialization and division of labor. Characteristics of bureaucratic behavior in the structure is the result of a pattern of behavior or bureaucracy. The research that was compiled was qualitative in nature. According to (Bogdan and Biklen in Muktar and Widodo 1982) data analysis is the process of systematically searching for and organizing interview transcripts, field notes and other materials found in the field. All that is collected to increase understanding (of a phenomenon) and help to present research findings to others. The role of the local government in alleviating poverty in Huidu village, West Limboto sub-district, needs to be optimized because the success of an activity is greatly influenced by the accuracy of the organization and the quality of education of village officials as well as the seriousness in carrying out the development program, the work system carried out and the supporting elements, namely the quality of the people and the facilities. required. In such circumstances, it will be possible to achieve an efficient and effective governance and development even though the resources are very limited

Key Words: Role, Local Government, Alleviation, Poverty.

Pendahuluan

Di setiap proses suatu negara berkembang tentunya mempunyai komitmen untuk membangun. Pembangunan yang

di laksanakan setiap negara berkembang mempunyai perbedaan prinsip yang dilandasi falsafah, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan

program pembangunan. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan negara berkembang secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dalam buku Hendro Asmara (1968:23) mengemukakan bahwa negara yang melaksanakan politik pembangunan berawal negara baru merdeka disebut dengan Negara baru berkembang, kemudian negara terbelakang, negara kurang berkembang, negara miskin, dan negara sedang berkembang, atau yang lebih dikenal dengan negara dunia ke tiga. Sejak dicanangkan program marshall plan (1949) kegiatan pembangunan di seluruh dunia mulai berkembang. (Murohman et al., 2018)

Pada mulanya gagasan Presiden Amerika Serikat Henry S. Truman ini di tujukan untuk membantu merehabilitasi Negara sekutu di Eropa setelah perang Dunia Ke II. Program tersebut selanjutnya diikuti oleh Negara kaya lainnya dan Badan Internasional guna membantu merehabilitasi negara-negara miskin pasca penjajahan. Setelah itu, terjadilah 2 kelompok Negara, yakni Negara maju dan Negara Berkembang. Negara berkembang umumnya memiliki jumlah penduduk yang banyak, sebagian besar berada di Daerah Pedesaan, dengan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi antara 6 -15 %, merebahnya pengangguran, titik berat sektor ekonomi yang di topang industri pertanian, kualitas SDM yang masih lemah dan aktif dalam proses pembangunan sosial-ekonomi. Faktor penduduk merupakan masalah yang sangat dominan dalam proses pembangunan di negara

berkembang, baik dari segi kualitas dan kuantitas, tingkat kehidupan maupun pemanfaatan potensi sehingga perlu dikembangkan agar menjadi modal dasar pembangunan. Peran Birokrasi pemerintahan mempunyai kedudukan dalam pengentasan kemiskinan melalui program yang telah dicangkan. Peran pemerintah hingga ketingkat desa / kelurahan yang mempunyai akses langsung selaku unsur penanggung jawab, pelaksana dan pendamping, harus mampu merangsang tumbuhnya kreatifitas dan motivasi masyarakat.(Christofer, 2019)

Masalah kemiskinan berkaitan erat dengan masalah sumber daya manusia, tingkat pendidikan dan strategi pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat. Menurut teori perubahan sosial (social change), peningkatan mutu sumber daya manusia sangat

relevan dengan pendidikan dalam rangka pembangunan sistem sosial dengan sudut pandang yang berlainan, baik secara makro maupun mikro. Berbeda dengan BLT, Program PKH hanya di peruntukan bagi masyarakat yang sangat miskin dan program ini hanya memberikan pemberdayaan melalui dua bidang yaitu masalah kesehatan, dan pendidikan. Jadi yang akan memperoleh fasilitas bantuan ini, hanya keluarga yang sangat miskin yang meski tak punya tanggungan anak bersekolah, tetapi memiliki masalah dengan kesehatan. (Ekonomi et al., 2020)

Masalah pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang telah dijalankan, perlu untuk dikaji kembali apakah benar-benar telah menyentu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada. Sebab jika berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat sentuhan yang

pertama yang harus dilakukan adalah Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Dalam buku S.H Sarundajang (2002 : 22-23) secara historis asal usul dari stuktur pemerintah daerah daerah yang kita kenal saat ini berakar dari eropa abad ke-11 dan abad ke-12(Murohman et al., 2018). Beberapa istilah yang digunakan untuk pemerintah daerah masih termasuk lama, berasal dari Yunani dan Latin kuno. Koinetes (komunikasi) dan demos (rakyat atau distrik) adalah istilah-istilah pemerintah daerah yang di gunakan di Yunani sampai sekarang. Dengan demikian, bisah dikatakan bahwa dalam melaksanakan peran dan fungsinya, pemerintah daerah (menurut pendekatan administrasi) menggunakan pendekatan tata administrasi yang diawali oleh pematangan struktur kekuasaan, pembagian tugas, spesialisasi, fungsi kegiatan, koordinasi, jejang pengawasan. (Minu, 2017)

Sedangkan menurut pendekatan psikologi sosial , pemerintah daerah berhubungan erat dengan perilaku manusia selaku unsur pemerintah daerah i dalam struktur organisasi pemerintahan, baik perilaku individu dalam kelompok formal dan non formal, mapun perilaku internal dan eksternal organisasi pemerintahan. Masalah kemiskinan memang telah ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masakini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. (Tabo & Gobe, 2022)

Berbagai persoalan kemiskianan penduduk memang menarik untuk disimak dari

berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilihan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil. Lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambilan keputusan. (Yulianto, 2005)

Metode Penelitian

Penelitian yang disusun bersifat kualitatif. Menurut (Bogdan dan Biklen dalam Muktar dan Widodo 1982) analisa data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan - bahan lain

yang ditemukan dilapangan. Kesemuaan yaitu di kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain. (Papilaya, 2020) Secara substansi pendapat ini menunjukkan bahwa di dalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. Inilah yang menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu kondisi dan keadaan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data-data berbentuk angka, seperti angka kemiskinan, dan faktor lain yang berpengaruh. Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik wawancara terbuka dengan panduan dan arahan oleh peneliti (guide quation). (Moleong, 2021)

Pembahasan

Penyelenggraan tugas pemerintah mempunyai peran penting dalam mewujudkan sebuah amanat dari para pendiri bangsa ini, dan merupakan tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat Indonesia. (Handayani & Yuliani, 2013) Hal ini secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam sebuah keberlangsungan hidup negara ialah semangat dan kesungguhan para aktor negara dan pemimpin pemerintahan. Dalam waktu yang lama, penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggara negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada tingkatan Pemerintah Pusat. (Ustama, 2009)

Di samping itu para aktor pemerintah pada tingkatan daerahpun kurang menyierusi tugas yang merupakan tanggung jawab mereka. Serta kurang seriusnya peran masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah. (Sasongko & Suwitri, 2012) Pada kenyataannya peran pemerintah hanyalah terwujud pada nilai dan arti dari sebuah konsep pembangunan itu sendiri, namun pada kenyataannya kita sering menemukan tidak koneknya sebuah konsep pembangunan dengan realisasi di lapangan. Ini mungkin diakibatkan oleh ketidakseriusan dari proses penyelenggaran pemerintah. Sebuah kebijakan hanya bisa dikatakan kebijakan, apabila kebijakan itu tepat pada sasaran. Tugas pemerintah dalam mewujudkan sebuah tatanan sosial yang egaliter adalah sebuah wujud nyata dari sebuah pengabdian

terhadap negara, namun disisi lain kita bisah melihat banyak terjadi praktek penyelenggaraan pekerjaan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhada tumbuhnya jamur yang berkepanjangan di negara ini, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme.(Christofer, 2019)

Yang dimaksud peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan ialah pengukuran terhadap tercapainya penyelenggaraan sesuai dengan tujuan organisasi pemerintahan yang telah di tentukan. Dalam penelitian ini peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan tingkat penyelesaian suatu suatu pekerjaan pemerintah yang mencapai standar kinerja dari sebuah program kerja organisasi

pemerintah. Standar kinerja yang di maksud adalah tingkat kesungguhan dari penyelesaian suatu pekerjaan yang diharapkan dari pemegang pekerjaan tersebut, dan dari kriteria terhadap kesuksesan perkerjaan, sebagai pelayan dan pelaksana pembangunan masyarakat. Dengan standar pekerjaan diatas, tentunya diikuti dengan program-program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kesejahteraan. (Angita et al., 2021)Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pembangunan suprastruktur di desa Huidu, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 : Pembangunan Suprastruktur

Jawaban	Responden (f)	Persentase (%)
Ya	20	62.5 %
Tidak	6	18.75 %
Ragu-ragu	3	9.38 %
Tidak sama sekali	3	9.38 %
Jumlah	32	100%

Dari table diatas tentang pembangunan suprastruktur bahwa dari 32 responden yang di wawancarai, sebanyak 62.5% menjawab bahwa pembangunan suprastruktur memang mengacu pada pembangunan ekonomi masyarakat yang efisien. Sedangkan yang menjawab tidak hanya 18.75 %, 9.38 % menjawab ragu-ragu dan sebanyak 9.38 % menjawab tidak tahu sama sekali. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa proses pembanguana suprastruktur didesa Huidu bisah memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan berbagai indikator pembangunan yang kesemuanya itu tidak lepas dari kesungguhan untuk memberikan tanggung jawab yang lebih terhadap kemaslahatan masyarakat.(Samud, 2018)

Dengan demikian, bisah dikatakan bahwa dalam melaksanakan peran dan fungsinya, pemerintah daerah (

menurut pendekatan administrasi) menggunakan pendekatan tata administrasi yang diawali oleh pematangan struktur kekuasaan, pembagian tugas, spesialisasi, fungsi kegiatan, koordinasi, jejang pengawasan. Sedangkan menurut pendekatan psikologi sosial , pemerintah daerah berhubungan erat dengan perilaku manusia selaku unsur pemerintah daerah i dalam struktur organisasi pemerintahan, baik perilaku individu dalam kelompok formal dan non formal, mapun perilaku internal dan eksternal organisasi pemerintahan.(Lasiman Sugiri, 2012)

Keberhasilan pemerintah daerah di ukur dari kemampuan mengartikulasikan pada kepentingan-kepentingan yang khusus dalam masyarakat menginkorporasikannya dalam kepentingan umum negara. (K. Poerbopranto 2000 : 23).Untuk mengetahui bagaimana proses

pembangunan infrastruktur terhadap respon pembangunan masyarakat, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 : Pembangunan infrastruktur

Jawaban	Responden (f)	Persentase (%)
Ya	15	46.88%
Tidak	8	25%
Ragu-ragu	6	18.75%
Tidak sama sekali	3	9.36%
Jumlah	32	100 %

Dari hasil pengamatan dilapangan sebanyak 32 responden yang diedarkan quisioner, maka yang menjawab bahwa pemangunan infra struktur bisah membangun animo masyarakat untuk membangun desa sebesar 46.88%, dan yang menjawab tidak 25 %, sedangkan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 18.75% dan yang tidak sama sekali adalah 9.36%. (Minu, 2017)Data diatas menunjukan bahwa naimo masyarakat dari pembangunan infra struktur sangatlah berpengaruh terhadap pembangunan dan partisipasi masyarakat, namun diharapkan

kepada pemerintah desa agar lebih efisinsi dalam membangun partisipasi masyarakat dalam rangka membangun desa yang pada intinya adalah membangun karakter ekonomi. Untuk mengetahui, apakah dengan fasilitas infrastruktur yang memadai bisah menjawab ataupun menyelesaikan segala persoalan ekonomi dan masalah sosial di masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 : Fasilitas Infrastruktur

Jawaban	Responden (f)	Persentase (%)
Ya	17	53.13%
Tidak	7	27.88%
Ragu-ragu	6	18.75%
Tidak sama sekali	2	6.25%
Jumlah	32	100%

Tabel data diatas tentang tentang apakah dengan pemebangunan infra struktur yang memadai bisah menjawab semua persoalan sosial dalam masyarakat, ternyata dari 32 responden 17 responden atau 53.13 % menjawab bisah menjawab permasalahan sosial dalam masyarakat, sedangkan yang menyakatan tidak berpengaruh adalah 27.88 % mengatakan ragu-ragu adalah 18.75 % dan tidak sama sekali adalah 6.25 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur bisah menjawab ataupun merespon keluhan masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah desa agar lebih mengoptimalkan fungsi dari infra struktur pada yang bisah bermanfaat bagi pendidikan masyarakat. (Widodo et al., 2012)

Pembangunan infrastruktur dapat diarahkan untuk mencapai daya guna dan manfaat bermutu yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian dan ketrampilan masyarakat. Untuk itu Peran Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan di desa Huidu kecamatan Limboto Barat perlu dioptimalkan sebab keberhasilan suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh ketepatan organisasi dan mutu pendidikan aparat desaserta keseriusan dalam menjalankan program pembangunan, seistem kerja yang dijalankan dan unsur-unsur pendukung yaitu mutu orang-orangnya serta sarana yang diperlukan. (Kasyful Mahalli Amalia, 2012) Dalam keadaan yang demikian maka akan dapat dicapai suatu penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna meskipun sumber-sumbernya sangat terbatas. Sejalan dengan itu maka penyelenggaraan pembanguna desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat tersebut untuk ikut serta dalam pembangunan desa yang semakin rasional tidak di dasarkan pada tuntutan individual maupun emosional yang sangat sukar di pertanggung jawabkan.(Papilaya, 2020)

Kesimpulan

Pejabat pemerintah termasuk Kepala Desa di era reformasi harus berfungsi sebagai (change agent) atau pelaku perubahan karena mereka memiliki kekuatan sebagai penentu kebijakan juga memikul tanggung jawab serta melaksanakan pembangunan dengan rasa tanggung jawab.

Kesungguhan dan kesriusan adalah kunci utama terhadap keberhasilahn proses pembangunan masyarakat.

Kelancaran

penyelenggaraan tugas pemerintah di Desa Huidu kecamatan Limboto Barat secara keseluruhan ditentukan oleh sumber daya organisasi aparat desa dan memenuhi semua tugas dan kewajibannya. Berdasarkan penelitian bahwa peran pemerintah daerah dalam mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dibidang pemerintahan dan pemabangunan masyarakat sudah berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemerintahan bagi seorang aparat dapat dilihat dari proses pendelegasian wewenang terhadap sesama aparat, pemberian petunjuk yang berkaitan dengan pelaksanaan

tugas, pelaksanaan pengawasan, perencanaan tugas dibidang administrasi pembanguna, penegakan disiplin serta peningkatan pendidikan bagi aparat, karena keberhasilan pembangunan sangat erat kaitannya dengan mutu pendidikan aparat. Pemerintah desa sebagai pejabat publik dituntut memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dalam melakukan Proses pembangunan desa dan penguatan ekonomi rakyat untuk mencapai suasana yang

Daftar Pustaka

- Angita, rista tri, Rinofah, R., & Sari, pristin prima. (2021). Peranan Pemerintah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui E - Warong Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Sunggal Medan. *Pengaruh Kepemiikan Institusional, Kebijakan Hutang, Keputusan Investasi Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan*, 02(01), 56–70.
- Christofer, O. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/25488>
- Ekonomi, P. I., Utara, U. S., Ekonomi, P. I., & Utara, U. S. (2020). *Melalui Program Peningkatan Keterampilan Di Kota Medan*. 5(2), 1–7.
- Handayani, syarifah dewi, & Yuliani, F. (2013). Implementasi Program Jaminan Kesehatan Daerah. *Administrasi Pembangunan*, 1, 219–323.
- Kasyful Mahalli Amalia. (2012).

- Amalia, A. Mahalli, K. Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 70-87. <https://doi.org/10.29244/jekp.3.1.2014.23-41>
- Lasiman Sugiri. (2012). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Dosen Jurusan Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro*, 11(2), 56-65.
- Minu, I. W. (2017). Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar). *Thesis*, 1-196.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Murohman, M., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2018). Peranan Sektor Ekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 23-41.
- Papilaya, J. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1113>
- Samud, S. (2018). Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3565>
- Sasongko, A., & Suwitri, S. (2012). Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Di Kecamatan Banyumanik

- Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/201/207>
- Tabo, S., & Gobe, R. (2022).
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai Desa Mootilango. 140, 73–80.
<http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1195>
- Ustama, D. D. (2009). Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Dialogue*, 6(1), 1–12.
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25.
<https://doi.org/10.14710/jde.p.1.1.25-42>
- Yulianto, T. (2005). Fenomena Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat). *Tesis*, 1.